Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi I
Minggu ke-5 Agustus
(25 s.d. 31 Agustus 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KERJA SAMA MODERNISASI ALUTSISTA INDONESIA DENGAN JEPANG

Aryojati Ardipandanto
Analis Legislatif Ahli Muda
aryojati.ardipandanto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada tanggal 19 Juli 2022 Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Menhan Jepang Iwamoto Tsuyohito beserta delegasi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta. Dalam pertemuan itu dibicarakan mengenai tindak lanjut kerja sama alih teknologi dalam rangka modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) antara Indonesia dengan Jepang. Menhan RI menegaskan bahwa melalui modernisasi alutsista dan penguasaan lompatan teknologi militer terkini.

Sebelumnya, Indonesia dan Jepang telah menjalin kesepakatan pengalihan alutsista dan teknologi pertahanan pada Maret 2021 dalam pertemuan "2+2" antara Menhan RI dan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dengan Menhan Jepang Kishi Nubuo dan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi di Tokyo, Jepang. Pertemuan ini ditindaklanjuti pada rangkaian acara ASEAN *Defence Ministers Meeting* (ADMM) ke-16 yang berlangsung pada tanggal 21 dan 22 Juni 2022 di Phnom Penh, Kamboja.

Terkait dengan kerja sama tersebut, hingga saat ini media Jepang menyebutkan kesepakatan antara kedua negara merupakan salah satu upaya menekan kekuatan China di ASEAN khususnya Laut China Selatan. Apalagi, Jepang merupakan salah satu negara kelompok Dialog Keamanan Segi Empat atau QUAD bersama Amerika Serikat, India, Australia sedang berupaya mengimbangi kekuatan China di Indo Pasifik.

Pengamat pertahanan dari *Institute for Security and Strategic Studies* (ISESS) Khairul Fahmi menilai kesepakatan ini merupakan pesan kuat dari Indonesia yang konsisten menolak klaim *"Nine dash line"* China di wilayah Laut Natuna Utara, Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan melihat hal-hal di atas, dapat dikatakan bahwa Kemenhan RI menghadapi dua tantangan sekaligus, yaitu pertama, bagaimana menyukseskan kerja sama dengan Jepang terkait modernisasi alutsista, terutama dengan dukungan penempatan pos-pos anggaran yang saat ini tengah dimutakhirkan oleh Kemenhan RI antara lain melalui pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Unit Organisasi Kemenhan Tahun 2023 pada 30 Agustus 2022, yang salah satunya untuk satuan kerja Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan RI. Bagaimana menyusun perbaikan RKA Tahun 2023 terkait kerja sama alutsista dengan negara lain yang sesuai dengan amanat dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan merupakan substansi yang harus dipenuhi oleh Kemenhan RI. Tantangan keduanya adalah bagaimana menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tetap berpolitik bebas aktif dalam politik pertahanannya sekaligus menunjukkan ketegasan terhadap segala ancaman bagi kedaulatan NKRI.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI harus mengingatkan Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan RI) untuk melaksanakan amanat UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (UU Industri Pertahanan) terkait kerja sama dan alih teknologi dalam hal alat peralatan pertahanan. Dalam Bagian Kedua UU Industri Pertahanan, yaitu tentang Standarisasi Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, Pasal 27 ayat (1) menyebutkan: "Pengguna mengusulkan standarisasi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan berdasarkan perencanaan strategis pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan". Ini berarti dalam kerjasama alutsista dengan Jepang, Kemenhan RI harus memperhatikan masukan dari TNI dan mempertimbangkannya untuk dituangkan dalam RKA Satuan Kerja Unit Organisasi Kemhan Tahun 2023 yang sedang diperbaiki.

Komisi I DPR RI juga perlu mendorong sinergitas Kemenhan RI dan Kemenlu RI untuk terus menginformasikan kepada dunia internasional bahwa kerja sama alutsista yang dilakukan dengan Jepang adalah dalam rangka memperkuat penjagaan atas kedaulatan RI di wilayah Indonesia manapun, tidak hanya di wilayah Laut China Selatan.

Sumber

aa.com.tr, 31 Maret 2021;
antaranews.com, 22 Juni 2022;
kemhan.go.id, 19 Juli dan 30 Agustus 2022;
UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Minggu ke-5 Agustus
(25 s.d 31 Agustus 2022)
2022

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official

EDITOR
Polhukam: Simela Victor M. Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang: Mandala Harefa, Riyadi Santoso, Sri Nurhayati Q, Ari M. Ginting, Ariesy Tri Mauleny
Kesra: Achmad Muchaddam F., Yulia Indahri, Rahmi Yuningsih

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S.
Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake
Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022